

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA ALOKASI UMUM
(DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2013-2015**

Benny Franco Sitompul

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

(Naskah diterima: 1 Maret 2019, disetujui: 20 April 2019)

Abstract

The research objective is to test and analyze the effect of regional original income, general allocation funds and special allocation funds on the allocation of capital expenditure budget to district / city governments in North Sumatra in 2013-2015. This study uses a quantitative research approach. The type of research used is descriptive research. The nature of this study is a causal relationship. The population used in this study is the district / city government in North Sumatra in 2013-2015 which amounted to 34 cities. A sample of 26 cities in North Sumatra with total sample of 34 cities. The research method used is pooled data which is a combination of periodic data with cross data. Regional original revenue, general allocation funds and special allocation funds have a positive and significant effect on the capital expenditure budget in district/city governments in North Sumatra in 2013-2015.

Keywords: PAD, DAU and DAK, Allocation of Capital Expenditures.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sifat penelitian ini adalah bersifat hubungan kausal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2013-2015 yang berjumlah 34 kota. Sampel sebanyak 26 kota di Sumatera Utara dengan total sampel sebanyak 34 kota. Metode penelitian yang digunakan adalah pooled data yaitu kombinasi antara data berkala dengan data silang. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2013-2015.

Kata Kunci: PAD, DAU dan DAK, Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang (*UU*) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan *UU* Nomor 32 tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Maka dari itu pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari (*Pendapatan Asli Daerah PAD*), (*Dana Alokasi Umum: DAU*), dan (*Dana Alokasi Khusus: DAK*).

Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendanaan daerah, maka Pemerintah Pusat melakukan transfer dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini digunakan untuk melakukan pembiayaan atas aktivitas operasi dan belanja yang lain termasuk didalamnya belanja modal yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah: APBD*.

II. KAJIAN TEORI

PAD sangat berpengaruh bagi sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. *PAD* didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain *PAD* yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal.

DAU diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (*APBN*) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membuayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (*APBN*) dari pemerintah pusat

ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan yaitu *DAU* untuk memberikan pelayanan kepada publik yang di realisasikan melalui belanja modal.

Salah satu dana perimbangan adalah *DAK*. Dana ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (*APBN*) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membaiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan perioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus (*DAK*) adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (*DAK*) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, serta peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (*DAK*) untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Sumatera Utara yang beribukotakan Medan terbagi dalam 26 kabupaten dan 8 kota. Kota Medan yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau

Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (*PAD*), Dana Alokasi Umum (*DAU*), dan Dana Alokasi Khusus (*DAK*) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2015.".

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar : Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Pendekatan Kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi textual atas fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh melalui situs www.djpk.depkeu.go.id pada rentang tahun

2013 - 2015 dan kemudian diolah dengan menggunakan *software SPSS ver. 24*.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif,yaitu adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau hubungan dengan variabel yang lain.

IV. HASIL PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data* yaitu kombinasi antara data berkala (*time series*) dengan data silang (*cross section*) selama periode 2013-2015.

Data penelitian diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2013–2015 yang dipublikasikan dalam situs www.djpk.depkeu.go.id. Selain itu data penelitian juga dihimpun dari jurnal-jurnal terkait, buku, skripsi, thesis, dan sumber-sumber lainnya. Model penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan model persamaan regresi berganda dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Belanja Modal
A	= Konstanta
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Dana Alokasi Umum
X ₃	= Dana Alokasi Khusus
b ₁	= Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah
b ₂	= Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum
b ₃	= Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus
e	= Tingkat Kesalahan Penganggu (error)

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, pengujian normalitas dengan memerhatikan grafik histogram, dan juga pengujian dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardlized Residual*.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

PAD		
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	121430.5000
	Std. Deviation	262203.1601
Most Extreme Differences	Absolute	.425
	Positive	.425
	Negative	-.334
Test Statistic		.425
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

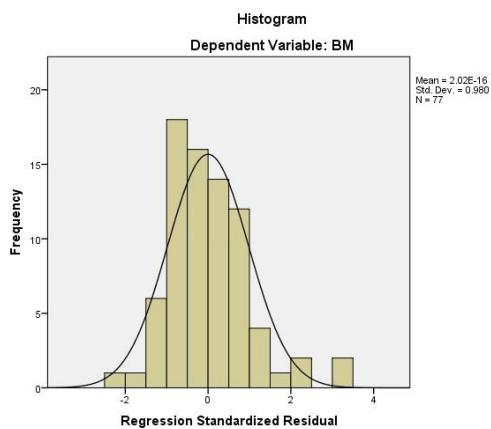
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil pengujian normalitas dengan menggunakan statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*) dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*) adalah 0,425 dan *Asymp. Sign. (2-tailed)* < 0,05 (koefisien signifikansi) yaitu 0,000.

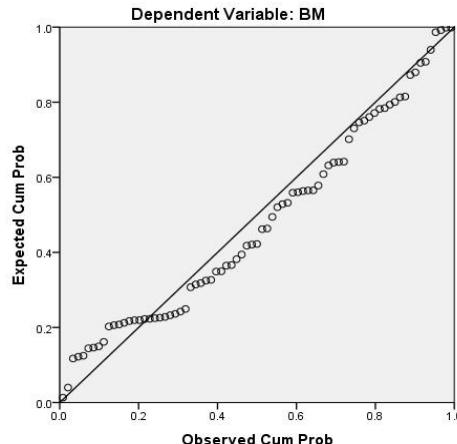
Gambar 1
Grafik Histogram



Dari hasil pengujian normalitas dengan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kurva yang seperti lonceng (skewness) ke kiri ataupun ke kanan.

Gambar 2
Grafik Dependent Variable

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari hasil pengujian normalitas dengan pengujian dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari sebaran titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Model pengujian hipotesis yang digunakan adalah model regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Model regresi linear berganda dikatakan sebagai model line-

ar berganda yang baik apabila memenuhi kriteria estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Pada pengujian ini, seluruh data terlebih dahulu di transform ke Logaritma. Dari pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda dapat digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS diperoleh hasil pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant) 56839.997	20866.792		2.724	.008
	PAD .330	.044	.585	7.555	.000
	DAU .138	.037	.308	3.709	.000
	DAK .722	.251	.179	2.874	.005

a. Dependent Variable: BM

$$\text{BM} = 56389 + 0,33 \text{ PAD} + 0,138 \text{ DAU} + 0,722 \text{ DAK} + e$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 56389 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variable Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus , maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal akan mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
2. Setiap kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah akan diikuti dengan kenaikan

pada variabel Belanja Modal sebesar 0,330 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan.

3. Setiap penurunan pada variabel Dana Alokasi Umum akan diikuti dengan penurunan pada variabel Belanja Modal sebesar 0,138 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan.
4. Setiap kenaikan pada variabel Dana Alokasi Khusus akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Belanja Modal sebesar 0,722 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan.

Koefisien Determinasi

Hasil pengujian menyatakan koefisien determinasi sebesar 0,770 yang berarti 77% pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan sisanya 23% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel-variabel ini.

Tabel 3
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.770	.761	58264.08452

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Uji f

Uji F adalah Uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84).

Tabel 4
Hasil Uji f

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.304E+11	3	2.768E+11	81.541
	Residual	2.478E+11	73	3394703545	
	Total	1.078E+12	76		

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Pengujian simultan membandingkan nilai signifikansi F tabel dengan nilai signifikan F hitung dengan nilai signifikansi yaitu 0,05.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial.

Tabel 5
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Beta			
1	(Constant)	56839.997	20866.792	2.724	.008
	PAD	.330	.044	.585	.555
	DAU	.138	.037	.308	.709
	DAK	.722	.251	.179	.874
					.005

a. Dependent Variable: BM

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji signifikansi parsial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan t hitungnya $7,555 > 1,98304$. Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal(Y).
2. Dana Alokasi Umum mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan t hitungnya $3.709 > 1,98304$. Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal(Y).
3. Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai signifikansi 0,008 yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan t hitungnya $2.874 > 1,69389$. Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Alokasi Umum (*DAU*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Dana Alokasi Khusus (*DAK*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy, dan Halim Abdul, 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik*,

dan *Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.

Arwati, Dini dan Novita Hadiati, 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013) ISBN: 979-26-0266-6 - 16 November 2013.

Bawono, Bernanda Gatot Tri. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten*. Tesis UII, Tidak dipublikasikan, Jember.

Cheema, G Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. 1983. *Decentralization and Development*. Sage Publication, Inc.

Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.

Erlina, et al. 2012. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, USU Press, Medan.

Garrison R.H. & E. W. Noreen. 2006. *Akuntansi Manajerial*, (terjemahan: A. Totok Budisantoso), Buku I, Edisi Kesebelas, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 4 Nomor 2 Edisi Mei 2019 (1-10)

- Gozhali, Imam. 2013. *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*, Universitas Diponogoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X* Makassar 26-28 Juli 2007.
- Haryuli, Olivia, Rasuli, M., dan Devi Safitri. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, Dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau)".* Diakses dari: www.jom.unri.ac.id
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>.
- Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.* Diakses dari: <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/049-ASPAK-09.pdf>
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Menteri dalam Negri No. 13 Tahun 2006.
- Pipin, Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2006. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK. 06/2005 tentang *Petunjuk Penyusunan, Penelahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006*.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Kab. Penukal Abab Lematang*.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Kab. Musi Rawas Utara*.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Riska, Afrisa Ayu Ira, Ahmidati, Fitri Nur, dan Anggraini, Rafiqoh Muthia Anggraini. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012*. Diakses dari: www.academia.edu

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

Sudarmanto, R, Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Siddik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Paper disajikan dalam Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”. Jakarta, 17-18 April 2002.

Syarifuddin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Binacipta

<http://www.djpk.depkeu.go.id>.

<http://www.spssindonesia.co.id>